

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 00.7.2/ 196 /BUP-LK/IX/2025

TANGGAL : 12 September 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
TAHUN 2025**

**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial tahun 2025. Renja ini merupakan pedoman pelaksanaan urusan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota untuk satu tahun kedepan.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan berpedoman pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja ini melibatkan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari internal Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota maupun dari pemangku kepentingan terkait. Untuk itu atas dukungan dan kontribusi yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Dalam penyajian Renja Perubahan ini masih terdapat kekurangan, saran dan perbaikan diharapkan untuk penyusunan perencanaan di masa mendatang.

Demikianlah Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 ini disusun, semoga semua yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Payakumbuh, September 2025



DAFTAR ISI

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH NOMOR :	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	II-8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II tahun 2023.....	II-8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-21
2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.....	II-26
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-31
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL	III-36
BAB IV : PENUTUP.....	IV-60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten Renja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Periode Pelaksanaan 2023.....	II- 11
Tabel 2.2	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II- 23
Tabel 2.3	: Data Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II- 26
Tabel 2.4	: SWOT Analisa Internal dan Eksternal.....	II- 28
Tabel 2.5	: Analisis Strategi dengan Faktor SWOT dan Matrik SWOT	II- 29
Tabel 2.6	: Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota	II- 33
Tabel 3.1	: Reviu Terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten LimaPuluh Kota	III-37
Tabel 3.3	: Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.....	III-49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, serta menindaklanjuti amanat pasal 343-368 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Maka setiap Perangkat Daerah (PD) melakukan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja (PD) tahun 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor... Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 dengan melakukan perubahan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target kinerja, pagu indikatif dan terkait lainnya berdasarkan data yang ditetapkan di dalam perkada perubahan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya dapat mengalami perubahan di tahun berjalan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 tahun 2017, Pasal 343 ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a.) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b.) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, merupakan dokumen wajib yang harus disusun dan disediakan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Ayat menyatakan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Pasal 356 ayat (1) menyatakan bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dijadikan: a.) Dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan b.) Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Selanjutnya Pasal 358 ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Perubahan RKPD dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Perubahan RKPD Tahun 2025 berdampak pada perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025.

Persiapan penyusunan perubahan RKPD meliputi :

- a. Penyusunan rancangan Keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan perubahan RKPD
- b. Orientasi mengenai perubahan RKPD

- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan perubahan RKPD
- d. Persiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah berdasarkan SIPD

Rancangan perubahan RKPD Kabupaten disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja PD.

Tahapan penyusunan perubahan Renja Dinas Sosial di mulai dari :

1. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja
2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja
3. Penetapan Perubahan Renja

KALENDER RENCANA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025																								Ket	
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni					
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
A	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD																										
1	Penyusunan Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2025																										
2	Penyampaian Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2025 ke Bappelitbangda																										
3	Verifikasi Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2025 Oleh Bappelitbangda																										
4	Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2025 setelah Verifikasi																										
B	Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD																										
1	Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD																										
2	Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2025 ke Bappelitbangda																										
3	Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2025 Oleh Bappelitbangda																										
4	Penyempurnaan Rancangan Akhir berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2025																										
C	Penetapan Perubahan Renja PD																										
1	Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Daerah																										

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2029;
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 123);
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan 2025 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan perubahan Rencana Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 antara lain:

1. Menjabarkan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Sosial.
2. Menyediakan Dokumen sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas sosial Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2025.
3. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025.

4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Sosial.
5. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Dinas Sosial pada tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut:

- I. Pendahuluan, yang berisi Gambaran Umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Dinas Sosial sampai Triwulan II Tahun 2025, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial, analisis kinerja pelayan Dinas Sosial, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan sebagainya.
- III. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial, berisi program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dan Pendanaan tahun 2025.
- IV. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan tahapan perencanaan pembangunan tersebut meliputi : 1) Penyusunan perencanaan, 2) Penetapan rencana, 3) Pengendalian pelaksanaan rencana, 4) Evaluasi pelaksanaan rencana. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana dilakukan oleh masing - masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksud, terhadap pengendalian dan evaluasi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bertujuan untuk mewujudkan:

1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah.
2. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional.
3. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah.
4. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD.
5. Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 181 ayat (3) Permendagri Nomor 86 tahun 2017, menyatakan bahwa Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Kabupaten/Kota. Selanjutnya di tingkat Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun pengendalian dan evaluasi dimaksud meliputi :

1. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
3. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Maksud dan tujuan evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan daerah tahun 2025 (RKPD tahun 2025) adalah untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RKPD tahun 2025 dengan RPJMD tahun 2025-2029 dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Evaluasi sampai triwulan II

RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 dijabarkan kedalam RKPD tahunan. Visi dari pembangunan daerah untuk tahun 2025-2029 adalah **“Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**. Upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 7 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif
4. Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan.
5. Meningkatkan pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing
6. Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan
7. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian nagari

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025. Dinas Sosial melaksanakan 4 Program, 11 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan, pada pergeseran Dinas Sosial melaksanakan 4 Program, 11 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dan di Perubahan Renja ini Dinas Sosial melaksanakan 4 Program, 11 Kegiatan dengan 28 Sub Kegiatan.

Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan triwulan II tahun 2025 ini bertujuan melihat perkembangan capaian target indikator program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah yang menangani bidang urusan sesuai Perangkat Daerah masing-masing yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2025 untuk mendapatkan target sasaran yang di rencanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun berjalan yang terdapat dalam RPJMD tahun 2021-2026.

Evaluasi Rencana Kerja sampai triwulan II juga memperhatikan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang terdapat dalam APBD tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD tahun 2025 dapat melihat seberapa jauh tingkat capaian yang dapat dicapai oleh perangkat daerah.

Dinas Sosial melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada RKPD tahun 2025 yaitu sebanyak 4 program, 11 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 7.195.335.832,- . Sampai triwulan I telah terjadi pergeseran anggaran sebanyak 1 (satu) kali. Pergeseran ini merubah dari anggaran Dinas Sosial yang semula Rp. 7.195.335.832,-menjadi Rp. 7.107.763.552,-. Realisasi capaian kinerja yang dilakukan sampai dengan Bulan Juni tahun 2025 (triwulan II) yaitu sebesar 29.93 % realisasi keuangan dan 30.07 % realisasi Fisik.

Adapun Capaian Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 sampai Triwulan ke II dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

(Formulir E.81)

Evaluasi Terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten
Renja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
Periode Pelaksanaan : 2025

Indikator dan Target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2025				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp		
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	39,601,203,290	95%	14,020,202,920	95%	4,067,603,533	95%	990,315,523	95%	-	95%	-	95%	990,315,523	95%	15,010,518,443	100%	37.90%	Dinas Sosial		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95%	488,329,000	95%	63,276,000	95%	17,579,100	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	63,276,000	100%	12.96%	Dinas Sosial		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tertindakannya Forum OPD dan RENJA	12	102,000,000	6	14,272,000	2	11,059,100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6	14,272,000	50%	13.99%	Dinas Sosial	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA	6	63,000,000	1	1,877,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,877,000	17%	2.98%	Dinas Sosial	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA Perubahan	6	58,500,000	1	1,877,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,877,000	17%	3.21%	Dinas Sosial	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA	6	58,500,000	1	1,917,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,917,000	17%	3.28%	Dinas Sosial	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan	6	58,500,000	1	1,904,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,904,000	17%	3.25%	Dinas Sosial	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP, SPIP, LKPJ, EKPPD, LPPD, PK, RKT, Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi, SPM dan Laporan Capaian Kinerja	72	102,829,000	35	36,004,000	15	6,520,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	35	36,004,000	49%	35.01%	Dinas Sosial	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah OH yang Melaksanakan Evaluasi Kinerja dan Monitoring Kegiatan APBD	516	45,000,000	122	5,425,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	5,425,000	24%	12.06%	Dinas Sosial	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	95%	27,317,093,190	95%	12,071,987,960	95%	3,812,324,033	95%	982,377,586	95%	-	95%	-	95%	-	95%	982,377,586	95%	13,054,365,546	100%	47.79%	Dinas Sosial
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Honor PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pejabat Pengadaan dan PPHP	72	26,983,854,690	48	12,055,947,960	12	3,812,324,033	3	982,377,586	0	-	0	-	0	-	3	982,377,586	51	13,038,325,546	70.83%	48.32%	Dinas Sosial

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
				5		6		7		8		9		10		11		12			13-6+12		14-13/5 x 100%							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp						
		Uraian Wajib																												
		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ dan Jumlah SPJ Kegiatan untuk Verifikasi	72	223,903,500	12	2,665,000	0	-								0	-	12	2,665,000	16.67%	1.19%	Dimas Sosial							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6	33,889,000	3	6,334,000	0	-								0	-	3	6,334,000	50.00%	18.69%	Dimas Sosial							
		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6	27,000,000	0	-	0	-								0	-	0	-	0.00%	0.00%	Dimas Sosial							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	23,995,000	24	5,105,000	0	-								0	-	24	5,105,000	33.33%	21.28%	Dimas Sosial							
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	6	24,451,000	1	1,936,000	0	-								0	-	1	1,936,000	16.67%	7.92%	Dimas Sosial							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95%	43,376,000	95%	4,125,000	95%	1,980,000								0	-	95%	4,125,000	100.00%	9.51%	Dimas Sosial							
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBM dan RKPBM	12	21,585,000	2	1,953,000	0	-								0	-	2	1,953,000	16.67%	9.05%	Dimas Sosial							
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	12	21,791,000	3	2,172,000	2	1,980,000								0	-	3	2,172,000	25.00%	9.97%	Dimas Sosial							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	269,976,000	95%	19,000,000	95%	-								95%	-	95%	19,000,000	100.00%	7.04%	Dimas Sosial							
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pakaian Khusus Hari Tertentu yang diadakan	420	210,000,000	1	19,000,000	0	-								0	-	1	19,000,000	0.24%	9.95%	Dimas Sosial							
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah OH yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54	59,976,000	0	-	0	-								0	-	0	-	0.00%	0.00%	Dimas Sosial							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	95%	2,464,758,100	95%	484,170,225	95%	88,870,400								2,155,000	95%	-	95%	-	95%	-	95%	2,155,000	95%	486,325,225	100.00%	19.73%	Dimas Sosial
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik yang diadakan	72	84,999,000	48	15,010,000	12	1,500,000	3	150,000	0	-	0	-	0	3	150,000	51	15,160,000	70.83%	17.84%	Dimas Sosial							

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100 %		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Urusan Wajib																						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	2,029,100,000	95%	501,312,144	95%	25,000,000	95%	2,224,540	95%	-	95%	-	95%	-	95%	2,224,540	95%	503,536,684	100.00%	24.82%	Dinas Sosial
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	54,690,000	36	2,467,000	12	500,000	3	50,000	0	-	0	-	0	-	3	50,000	39	2,517,000	54.17%	4.60%	Dinas Sosial
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet	72	345,420,000	48	110,415,144	12	24,500,000	3	2,174,540							3	2,174,540	51	112,589,684	70.83%	32.60%	Dinas Sosial
		Penyediaan Jasa Percetakan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	45,000,000	0	-	0	-									0	-	0	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Gaji PTT, THL dan Honor Pengurus barang Pengguna	72	1,583,990,000	36	388,430,000	0	-									0	-	36	388,430,000	50.00%	24.52%	Dinas Sosial
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	2,842,527,000	95%	806,309,041	95%	94,890,000	95%	3,558,397	95%	-	95%	-	95%	-	95%	3,558,397	95%	809,867,438	100.00%	28.49%	Dinas Sosial
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6	211,626,000	0	-	0	-									-	0	-	0	0.00%	0.00%	Dinas Sosial
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	72	1,510,797,000	48	584,446,374	12	88,600,000	3	3,558,397							3	3,558,397	51	588,004,771	70.83%	38.92%	Dinas Sosial
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata Perbaikan Peralatan Kantor yang dilakukan dalam Satu Tahun	72	96,240,000	47	17,979,400	12	6,290,000									0	-	47	17,979,400	65.28%	18.68%	Dinas Sosial
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pekerjaan Rehab Berat Gedung Kantor	6	823,864,000	2	203,883,267	0	-									0	-	2	203,883,267	33.33%	24.75%	Dinas Sosial
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	200,000,000	0	-	0	-									0	-	0	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial
II	Memingkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang di Berdayakan	95%	13,560,561,000	95%	3,365,099,774	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	3,365,099,774	100.00%	24.82%	Dinas Sosial
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	95%	13,560,561,000	95%	3,365,099,774	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	3,365,099,774	100.00%	24.82%	Dinas Sosial

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp	
																										8
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100 %		15		
		Urusan Wajib																								
III	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan Pemilihan Pilar-pilar Berprestasi	81	2.511.609,000	81	557.844,200	0	-									81	-	81	557.844,200	100,00%	22,21%	Dinas Sosial		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKS dan Pemilihan Pilar-Pilar Berprestasi	13	932.242,500	13	252.374,700	0	-									0	-	13	252.374,700	100,00%	27,07%	Dinas Sosial		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana PPKS, Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat (RLTH) Pengadaan Bangunan Warung Binaan Sosial (Warbinsos) dan Jumlah Pemberian Bantuan UEP Fakir Miskin	456	3.215.660,000	204	1.763.733,090	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	204	1.763.733,090	44,74%	54,85%	Dinas Sosial		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna Yang Mengikuti Sosialisasi dan Lomba Karang Taruna dan Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang di berdayakan	104	6.051.491,300	217	749.853,284	0	-									0	-	217	749.853,284	208,65%	12,39%	Dinas Sosial		
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Sosial dan Penyerahan Bantuan untuk Masyarakat	66	849.558,200	11	41.294,500	0	-									0	-	11	41.294,500	16,67%	4,86%	Dinas Sosial		
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	25%	450.000,000	0%	-	0%	-									0	-	0%	-	0,00%	0,00%	Dinas Sosial		
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	25%	450.000,000	0%	-	0	-									0	-	0%	-	0,00%	0,00%	Dinas Sosial		
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	6	450.000,000	0	-	0	-									0	-	0%	-	0,00%	0,00%	Dinas Sosial		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2025	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I		II		III		IV				13 = 6 + 12			14 = 13/5 x 100 %			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp
		URUSAN WAJIB																					
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85%	26,642,853,800	85%	8,057,801,334	85%	2,799,921,998		12,000,000	85%	-	85%	-	85%	12,000,000	85%	8,069,801,334	100.00%	30.29%	Dinas Sosial	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	85%	22,543,488,800	85%	4,956,002,094	85%	730,942,432		6,000,000	85%	-	85%	-	85%	6,000,000	85%	4,962,002,094	100.00%	22.01%	Dinas Sosial	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan bagi Lansia Terlantar, Lansia Tidak Potensial UEP bagi Lansia	12152	13,724,705,300	2275	1,816,732,797	10	15,250,000								0	-	2275	1,816,732,797	18.72%	13.24%	Dinas Sosial
		Penyediaan Sandang	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Bayi Terlantar dan Disabilitas Terlantar	596	1,194,416,500	100	130,244,836	8	13,000,000								0	-	100	130,244,836	16.78%	10.90%	Dinas Sosial
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pemberian Alat Bantu Cacat bagi Lansia	528	1,476,209,500	98	88,390,928	44	53,000,000								0	-	98	88,390,928	18.56%	5.99%	Dinas Sosial
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	360	447,632,000	153	66,835,514	0	-								0	-	153	66,835,514	42.50%	14.93%	Dinas Sosial
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pelatihan, Pelayanan dan Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas, Tersedianya Rumah Idaman UILS/Rumah Antara/Rumah Singgah bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan	274	2,146,194,500	90	348,730,623	15	71,000,000		0		0		0		0	-	90	348,730,623	32.85%	16.25%	Dinas Sosial
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	150	900,000,000	146	489,729,840	0	-								0	-	146	489,729,840	97.33%	54.41%	Dinas Sosial

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12			13 = 6 ÷ 12		14 = 13,5 x 100 %	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		Urusan Wajib																						
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pelatihan bagi Anak Terlantar dan Putus Sekolah dan Pengiriman Anak ke Panti Rehabilitasi dan Bimbingan Lanjut untuk Anak terlantar (Putus Sekolah)	480	1,374,685,000	1973	1,919,059,956	595	553,692,432		6,000,000					0	6,000,000	1973	1,925,059,956	411.04%	140.04%	Dinas Sosial		
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	30	123,000,000	0	-	0	-		-					0	-	0	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial		
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30	123,000,000	0	-	0	-		-					0	-	0	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial		
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi Sosial	169	1,033,646,000	69	96,277,600	75	25,000,000							0	-	69	96,277,600	40.83%	9.31%	Dinas Sosial		
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	85%	4,099,365,000	85%	3,101,799,240	85%	2,068,979,566		6,000,000					-	85%	6,000,000	85%	3,107,799,240	100.00%	75.81%	Dinas Sosial	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	60	150,000,000	0	-	0	-		-					0	-	0	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial		
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	180	165,000,000	0	-	0	-		-					0	-	0	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial		
		Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	180	165,000,000	0	-	0	-		-					0	-	0	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial		
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	90	150,000,000	0	-	0	-		-					0	-	0	-	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	60	150,000,000	0	-	0	-		-					0	-	0	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bantuan UEP dan bimbingan lanjut untuk wanita tuna susila	140	1,332,480,000	179	905,979,882	99	471,104,288.00							0	-	179	905,979,882	127.86%	67.99%	Dinas Sosial		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2025	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					6			7		8		9		10			11				12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100 %	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
Urusan Wajib																										
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	60	150,000,000	181	864,819,325	285	1,247,875,278.00	6,000,000							0	6,000,000	181	870,819,325	301.67%	580.55%	Dinas Sosial			
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD Serta Sosialisasi	212391	1,028,450,000	209199	1,331,000,033	17	350,000,000								0	-	209,199	1,331,000,033	98.50%	129.42%	Dinas Sosial			
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	60	150,000,000	0	-	0	-	-							0	-	0%	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial			
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60	150,000,000	0	-	0	-	-							0	-	0%	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial			
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	60	150,000,000	0	-	0	-	-							0	-	0%	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial			
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Jumlah Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mengikuti Bimbingan Teknis	159	358,435,000	0	-	0	-	-							0	-	0%	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial			
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85%	9,989,848,600	85%	1,185,574,609	85%	-	85%	-	85%	-	85%	-	85%	-	-	85%	1,185,574,609	100.00%	11.87%	Dinas Sosial			
		Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar	85%	880,000,000	85%	-	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	85%	-	100.00%	0.00%	Dinas Sosial			
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	108	225,000,000	0	-	0	-	-							0	-	0%	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial			
		Rujukan Anak - Anak Terlantar	Jumlah Rujukan Anak - Anak Terlantar	130	345,000,000	0	-	0	-	-							0	-	0%	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial			
		Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	156	310,000,000	0	-	0	-	-							0	-	0%	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				6		7		8		9		10						11						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Urusan Wajib		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah/Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	95%	9,109,848,600	95%	1,185,574,609	95%	-	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	1,185,574,609	100.00%	13.01%	Dinas Sosial	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PPKS dan PSKS	13	2,461,734,600	13	290,507,346	0	-							0	-	13	290,507,346	100.00%	11.80%	Dinas Sosial		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) Sembako	24994	887,854,900	25287	78,893,200	0	-							0	-	25287	78,893,200	101.17%	8.89%	Dinas Sosial		
		Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Monitoring Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan (PKH)	16898	2,070,546,300	21958	467,226,063	0	-							21958	-	43916	467,226,063	259.89%	22.57%	Dinas Sosial		
		Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Bantuan UEP untuk WRSE dan KTK	564	3,689,712,800	67	348,948,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	67	348,948,000	11.88%	9.46%	Dinas Sosial		
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100%	3,612,297,000	100%	758,526,969	100%	294,442,401	20,127,000	100%	-	100%	-	100%	-	20,127,000	100%	778,653,969	100.00%	21.56%	Dinas Sosial		
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	95%	2,458,829,900	95%	716,036,969	95%	294,442,401	20,127,000	95%	-	95%	-	95%	-	20,127,000	95%	736,163,969	100.00%	29.94%	Dinas Sosial		
		Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan dan Pembangunan Gudang Logistik	859	1,147,199,900	605	435,423,676	157	198,013,701	25	15,752,000					25	15,752,000	630	451,175,676	73.34%	39.33%	Dinas Sosial		
		Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang untuk Korban Bencana	900	543,000,000	150	186,469,764	41	89,678,700		4,125,000					0	4,125,000	150	190,594,764	16.67%	35.10%	Dinas Sosial		
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1	500,000,000	0	-	0	-		-					0	-	0	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial		
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan orang terlanjar dalam perjalanan	72	86,000,000	27	8,330,000	2	6,750,000	1	250,000					1	250,000	28	8,580,000	38.89%	9.98%	Dinas Sosial		
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Penggantian transportasi Tagana dan selter Pengungsi	83	182,630,000	94	85,813,529	0	-							0	-	94	85,813,529	113.25%	46.99%	Dinas Sosial		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2025	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II		III		IV					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x 100 %	15				
		Urusan Wajib		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	95%	1,153,467,100	95%	42,490,000	95%	-	-	-	0	-	95%	42,490,000	100.00%	3.68%	Dinas Sosial
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Sosialisasi untuk Kampung Siaga Bencana dan Pembentukan Kampung Siaga Bencana	7	600,000,000	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dan Perekrutan Tagana Muda	150	553,467,100	25	42,490,000	0	-	-	-	0	-	25	42,490,000	16.67%	7.68%	Dinas Sosial
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik	95%	1,107,548,100	95%	150,827,700	95%	33,367,900	-	-	95%	-	95%	150,827,700	100%	13.62%	Dinas Sosial
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	95%	1,107,548,100	95%	150,827,700	95%	33,367,900	-	-	95%	-	95%	150,827,700	100%	13.62%	Dinas Sosial
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Rehab sarana dan Prasarana Makam Pahlawan dan Peringatan Hari Pahlawan 10 November	12	689,548,100	4	132,827,700	1	33,367,900	-	-	0	-	4	132,827,700	33.33%	19.26%	Dinas Sosial
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3	300,000,000	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Hari Kerja Tenaga Pengamanan Taman Makam Pahlawan	72	118,000,000	12	18,000,000	0	-	-	-	0	-	12	18,000,000	16.67%	15.25%	Dinas Sosial
		Total					7,195,335,832		1,022,442,523		-		-	1,022,442,523				
							Rata - rata capaian kinerja (%)		14.21		0.00		0.00		0.00		14.21	
							Predikat Kinerja											

Dari table diatas dapat kita simpulkan bahwa faktor- faktor pendorong keberhasilan kinerja pada Dinas Sosial adalah tersedianya bantuan sosial berupa barang yaitu bantuan permakanaan, sandang, alat bantu cacat, usaha ekonomi produktif, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, Lanjut Usia, Gelandangan dan Pengemis, Wanita Rawan Sosial ekonomi dan fakir miskin. Kemudian adanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam membatu penanganan PPKS. Faktor penghambat keberhasilan kinerja yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran pada Dinas Sosial dalam menangani 26 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Tindak lanjut yang harus dilakukan untuk Rencana Kerja Dinas Sosial adalah :

1. Menyusun perencanaan yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan bisa optimal dan hasil yang maksimal.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan program kegiatan.
3. Mengefektifkan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan Instansi terkait baik lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota maupun diluar Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Merencanakan kegiatan dan pengendalian atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing- masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial :

1. Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.
2. Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti dan anak terlantar di luar panti, indikator pencapaian Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar sosial di luar panti.

3. Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, indikator pencapaian jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
4. Jenis pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khusus nya gelandangan dan pengemis di luar panti, Indikator pencapaian jumlah warga negara atau gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti.
5. Jenis Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, yang disesuaikan dengan format terlihat pada tabel 2.2 berikut ini :

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKD	IKU KEPALA PD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 (TW i)	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	√			25	25	25	25	25	18	N/A	25	25	
2	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	√			20	25	30	30	20	41	N/A	30	30	
3	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	√			275	300	263	263	275	705	N/A	263	263	
4	Jumlah warga Negara /Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	√			0	5	5	5	0	4	N/A	5	5	
5	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	√			173	180	162	162	173	359	120	162	162	
6	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		√		86.8	88.2	89.6	91,3	97.66	95,10	N/A	91,3	91,3	
7	Persentase PMKS yang tertangani		√		94.3	95.2	96.2	97,1	98.11	95,10	N/A	97,1	97,1	
8	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		√		93.6	93.8	94	94,3	97.16	95,10	N/A	94,3	94,3	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKD	IKU KEPALA PD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 (TW i)	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		√		98	98	98	98	100	100	N/A	98	98	
10	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		√		98	98	98	98	0	0	N/A	98	98	
11	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		√		64	65	66	67	84	97,2	N/A	67	67	
12	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		√		7,6	7,6	7,6	7,6	20,38	17	N/A	7,6	7,6	
13	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota		√		100	100	100	100	100	100	N/A	100	100	
14	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			√	74	76	78	80	74,53	79,98	N/A	80	80	
15	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			√	95	95	95	95	95	95	N/A	95	95	
16	Nilai AKIP			√	65	65	65	65	72,95	79,42	N/A	65	65	
17	Nilai IKM			√	85	85	85	85	87,84	88,46	N/A	85	85	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK/IKD	IKU KEPALA PD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 (TW i)	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	indeks Kesejahteraan Sosial			V										Tidak ada data
19	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial			V	0	Tidak ada data	78	80	0	0	N/A	Tidak ada data	Tidak ada data	
20	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial			V	0	Tidak ada data	100	100	0	0	N/A	Tidak ada data	Tidak ada data	
21	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial			V	0	95	95	95	0	0	N/A	Tidak ada data	Tidak ada data	
22	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			V	0	65	75	76	0	0	N/A	Tidak ada data	Tidak ada data	
23	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		V											Tidak ada data
24	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota/kabupaten		V											Tidak ada data

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah khususnya Provinsi. Mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah Provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan. Peran dan fungsi kementerian sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marginal lainnya. Hal ini dilandasi dengan semangat kegotong royongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama. Dalam penerapan Renstra kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi kemiskinan.

Dalam mencapai kinerja Pembangunan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera dan Kementerian Sosial Republik Indonesia guna meningkatkan melayani, pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka identifikasi permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah di bidang sosial dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap kesejahteraan masyarakat. Identifikasi ini difokuskan terhadap permasalahan urusan sosial. Data permasalahan dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Data Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar	Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana

Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ada 26 Jenis :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah.
7. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalah Gunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap pencapaian program nasional /internasional. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dengan Visi **“LIMA PULUH KOTA BERMARTABAT, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”** Adapun misi Kepala Daerah yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah Misi ke-3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Andal, Sehat, Produktif Dan Kompetitif.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah : Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT).

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial ke depan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada.

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/ kemampuan, atau keuntungan.

Sedangkan **kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

Peluang, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **ancaman** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

Tabel 2.4

SWOT Analisa Internal dan Eksternal

KEKUATAN (Strengths)		KELEMAHAN (Weaknesses)	
S1	Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial	W1	Tenaga sosial yang profesional masih kurang
S2	Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur cukup tinggi	W2	Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas belum mencukupi
S3	Fasilitas pendukung kerja cukup memadai	W3	Keterbatasan anggaran
		W4	Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang
		W4	Masih kurangnya tenaga TKSK/PSM yang aktif di nagari dan kecamatan

PELUANG (Opportunities)		ANCAMAN (Threats)	
O1	Dukungan dari sumber-sumber kesejahteraan sosial cukup tinggi	T1	Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
O2	Jaringan kerja lembaga pemerintah dan swasta terbuka pada level regional dan nasional	T2	Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan sehingga meningkatkan kerawanan bencana sosial
O3	Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas PMKS		

Tabel 2.5

**Analisis Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)**

<p>INTERNAL</p> <p>EKSTERNAL</p>	<p>KEKUATAN (Strengths)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan penyandang masalah sosial ➤ Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur yang cukup tinggi ➤ Fasilitas pendukung kerja cukup memadai 	<p>KELEMAHAN (Weaknesses)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tenaga sosial yang profesional masih kurang ➤ Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas belum mencukupi ➤ Keterbatasan anggaran ➤ Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang ➤ Masih kurangnya tenaga TKSK/PSM yang aktif di nagari dan kecamatan
<p>PELUANG (Opportunities)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dukungan dari sumber-sumber kesejahteraan sosial cukup tinggi ➤ Jaringan kerja lembaga pemerintah dan swasta terbuka pada level regional dan nasional ➤ Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas PPKS 	<p><u>STRATEGI S + O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan peran lembaga dalam memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan sosial ➤ Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta dalam penanggulangan masalah sosial ➤ Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi ➤ Meningkatkan kesejahteraan PPKS 	<p><u>STRATEGI W + O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan profesional aparatur dalam peningkatan pembinan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial ➤ Mengelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif dan efisien dalam membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (<i>networking</i>). ➤ Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

ANCAMAN (Threats)	STRATEGI S + T	STRATEGI W + T
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ➤ Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menurunkan angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ➤ Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

1. Strategi Kekuatan – Peluang (S – O) :

- a. Meningkatkan peran lembaga dalam memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan sosial
- b. Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta dalam penanggulangan masalah sosial
- c. Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi
- d. Meningkatkan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

2. Strategi Kelemahan – Peluang (W – O) :

- a. Meningkatkan profesional aparaturnya dalam peningkatan pembinaan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial
- b. Mengelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif dan efisien dalam membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (*networking*).
- c. Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

3. Strategi Kekuatan – Ancaman (S – T) :

- a. Menurunkan angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- b. Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana

4. Strategi Kelemahan-Ancaman (W – T) :

- a. Meningkatkan profesional aparaturnya guna meningkatkan kemandirian PPKS
- b. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam (lahan), melalui investasi yang didukung oleh swasta

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum optimalnya bantuan tanggap darurat bencana
3. Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *valid* dan *up to date* di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan;
5. Masih diperlukan nilai- nilai kesetiakawanan sosial
6. Sarana prasarana yang terbatas dalam penanganan PPKS
7. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparatur di Dinas Sosial

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Sosial berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2025, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan ada yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Sosial. Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa Dinas Sosial harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Sosial dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Sosial dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 disajikan pada tabel II.6 berikut :

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025					
Kabupaten Lima Puluh Kota					
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial					
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
MUSRENBANG					
1	Program : REHABILITASI SOSIAL				
1	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
a	Sub Kegiatan : Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Permakanan Lansia)	70 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
Kegiatan :Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
a	Sub Kegiatan :Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (UEP Fakir Miskin)	12 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah

POKOK PIKIRAN DPRD					
1	Program : REHABILITASI SOSIAL				
1	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
a	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Alat Bantu Disabilitas dan UEP Disabilitas)	3 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
b	Sub Kegiatan : Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Permakanan Lansia dan UEP Lansia,)	395 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
2	Kegiatan :Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
a	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (pemberian bantuan sosial yaitu usaha Ekonomi produktif (UEP) barang bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Tindak Kekerasan (KTK)	10 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
b	Sub Kegiatan :Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (UEP Fakir Miskin dan UEP KUBE)	18 Orang dan 2 Kelompok	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah

Pada tabel 2.6 usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 yaitu pada forum Musrenbang Kecamatan adalah :

Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Sub Kegiatan Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. Indikator pada Sub Kegiatan ini adalah Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar Kewenangan kabupaten/ Kota (Permakanan Lansia) yaitu Pemberian Bantuan Sosial Barang permakanan bagi lanjut usia dengan target yang direncanakan sebanyak 70 orang. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu dengan indikator keluaran jumlah orang yang mendapatkan

alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota dengan target 2 orang. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA. Indikator keluran sub kegiatan jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin sebanyak 12 orang.

Usulan Pokok- Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 usulan yang layak adalah :

Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu Indikator pada Sub Kegiatan ini adalah jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota (alat bantu Disabilitas dan UEP disabilitas) dengan target yang direncanakan sebanyak 3 orang. Sub Kegiatan Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan indikator keluran sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota. Pada sub kegiatan ini adalah pemberian bantuan sosial berupa bantuan permakanan Lanjut Usia , dengan target sebanyak 395 orang. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Sub kegiatan Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (pemberian bantuan sosial yaitu bantuan sosial usaha Ekonomi produktif (UEP) bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Tindak Kekerasan (KTK) sebanyak 10 orang. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA. Indikator keluran sub kegiatan jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin sebanyak 18 orang dan bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama(KUBE) sebanyak 2 Kelompok.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Indikator : Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

2. Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Indikator : Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah

Indikator : Nilai AKIP dan Nilai IKM

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial ada 3 Sasaran yaitu Satu: Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS untuk Tahun 2025 targetnya 78 %. PPKS terdiri dari Anak Terlantar, Disabilitas, Lanjut Usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis, Fakir Miskin, Wanita Korban Tindak Kekerasan (KTK), Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Bencana. Dua : Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pada sasaran ini di targetkan 95 % untuk Tahun 2025 yang di Nilai Peran aktif semua PSKS yang ada. Tiga : Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah, target tahun 2025 nilai AKIP 65, dan Nilai IKM 85.

Tabel 3.1											
Reviu Terhadap Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2025											
No	Renja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS SOSIAL				7,078,401,437.00					7.187.983.934,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7,078,401,437.00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.187.983.934,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				7,078,401,437.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				7.187.983.934,00	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	95 %	3,908,602,537.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	95 %	4.059.803.291,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah</i>	95 %	16,970,100.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah</i>	95 %	14.223.100,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	9,970,100.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	8,214,100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi</i>	1 Dokumen	0.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi</i>	1 Dokumen	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	0.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	0.00	

No	Renja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0.00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0.00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	7.000.000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	6.009.000.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0.00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	3,651,222,937.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	3.819.214.791.00	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	3,646,222,937.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	3.819.214.791.00	Penambahan Gaji Pokok
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0.00	

No	Renja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,500,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0.00	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2,500,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0.00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	1,980,000.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	2.256.000,00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0.00	
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1,980,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.256.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	0.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	0.00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	39 Paket	0.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	39 Paket	0.00	

No	Renja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	91.763,500.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	57.619,400.00	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1,500,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1,500,000.00	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12,359,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12,476,000.00	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8,079,500.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8,079,400.00	
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9,960,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9,435,000.00	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	59,865,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	26,129,000.00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	34,100,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	25,000,000.00	
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	34,100,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	25,000,000.00	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	25,556,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	46,600,000.00	
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	1,056,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	500,000.00	

No	Renja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24,500,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24,500,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	21.600.000,00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	87,010,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	94,890,000.00	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	80,210,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	88,600,000.00	
	Pemeliharaan Mebel										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0.00	
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6,800,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6,290,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0.00	

No	Renja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		<i>Persentase PSKS yang di Berdayakan</i>	95 %	478,919,600.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		<i>Persentase PSKS yang di Berdayakan</i>	0 %	0.00	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</i>	95 %	478,919,600.00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</i>	0 %	0.00	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	80 Orang	259,372,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0	0.00	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota											
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	13 Orang	89,547,600.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0	0.00	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota											
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50 Keluarga	0.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0	0.00	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2 Lembaga	100,000,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0	0.00	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)											
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	30 Sertifikat	30,000,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0	0.00	

No	Renja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		<i>Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial</i>	100 %	1,754,912,300.00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		<i>Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial</i>	100 %	2.824.353.622,00	
8	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		<i>Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	100 %	735,580,000.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		<i>Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	100 %	710,394,432.00	
15	Penyediaan Permakanan										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	90 Orang	83,000,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	90 Orang	12,662,000.00	
16	Penyediaan Sandang										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	8 Orang	28,480,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	8 Orang	10,570,000.00	
17	Penyediaan Alat Bantu										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	3 Orang	13,090,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	3 Orang	50,201,000.00	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50 Orang	27,826,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50 Orang	0.00	

No	Renja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2 Orang	16,000,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2 Orang	71,000,000.00	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0 Orang	0.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0 Orang	0.00	
19	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	465 Orang	537,750,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	465 Orang	553,692,432.00	
20	Pemberian Layanan Rujukan										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	25 Orang	29,434,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	25 Orang	12,269,000.00	
9	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		<i>Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial I (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>	100 %	1,019,332,300.00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		<i>Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial I (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>	100 %	2.113.959.190.00	

No	Renja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	393,959,900.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	471,104,288.00	
22	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	112 Orang	593,368,400.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	112 Orang	1.292.854.902.00	
23	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	32,004,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	350,000,000.00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85 %	407,028,600.00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	0 %	0.00	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	95 %	407,028,600.00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	0 %	0.00	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	257716 Orang	76,452,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	0	0.00	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	24418 Keluarga	0.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	0	0.00	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22950 Keluarga	330,576,600.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0.00	

No	Renja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat											
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	0.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0.00	
3.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100 %	495,570,400.00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100 %	274.845.921,00	
10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 %	495,570,400.00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 %	274.845.921,00	
24 Penyediaan Makanan											
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	229,768,500.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	182,887,221.00	
25 Penyediaan Sandang											
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	151 Orang	188,148,700.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	78.458.700,00	
26 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan											
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	16,420,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	13.500.000,00	
Pelayanan Dukungan Psikososial											
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	61,233,200.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0.00	

No	Renja Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		-	-	0.00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		-	-	0.00	-
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	0.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0.00	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	0.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0.00	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik	95 %	33,368,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik	95 %	28,981,100.00	
11	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	95 %	33,368,000.00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	95 %	28,981,100.00	
27	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										
		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	33,368,000.00		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	28,981,100.00	
					7,078,401,437.00					7.187.983.934,00	

3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Sosial semula Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada RKPD tahun 2025 yaitu sebanyak 4 Program, 11 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 7.195.335.832,-. Pada pergeseran I terjadi perubahan anggaran sehingga Dinas Sosial melaksanakan 4 Program, 11 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp 7.107.763.552,- dan pada RKPD Perubahan, anggaran Dinas Sosial menjadi Rp 7.187.983.934,- sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor ... Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Perubahan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KAB. LIMA PULUH KOTATAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS SOSIAL							7.078.401.437,00	7.195.335.832,00	7.187.983.934,00	109.582.497,00							12.099.950.800,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.078.401.437,00	7.195.335.832,00	7.187.983.934,00	109.582.497,00							12.099.950.800,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							7.078.401.437,00	7.195.335.832,00	7.187.983.934,00	109.582.497,00							12.099.950.800,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95%	95%	3.908.602.537,00	4.067.603.533,00	4.059.803.291,00	203.460.463,00							4.112.063.000,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah				95%	95%	16.970.100,00	17.579.100,00	14.223.100,00	-2.747.000,00			-	-	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah		21.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.970.100,00	11.059.100,00	8.214.100,00	-1.756.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					15 Laporan	15 Laporan	7.000.000,00	6.520.000,00	6.009.000,00	-991.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-	-	3.651.222.937,00	3.812.324.033,00	3.819.214.791,00	167.991.854,00			-	-			3.510.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					39 Orangbulan	38 Orangbulan	3.646.222.937,00	3.812.324.033,00	3.819.214.791,00	172.991.854,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			3.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	0 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03		Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	1.980.000,00	1.980.000,00	2.256.000,00	276.000,00			-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.980.000,00	1.980.000,00	2.256.000,00	276.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis			19.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				39 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis			19.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	91.763.500,00	88.870.400,00	57.619.400,00	-34.144.100,00			-	-			109.563.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.359.000,00	12.476.000,00	12.476.000,00	117.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.079.500,00	8.079.400,00	8.079.400,00	-100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.063.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	9.960.000,00	9.960.000,00	9.435.000,00	-525.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	10 Laporan	59.865.000,00	56.855.000,00	26.129.000,00	-33.736.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	34.100.000,00	26.960.000,00	25.000.000,00	-9.100.000,00			-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah			20.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	3 Unit	34.100.000,00	26.960.000,00	25.000.000,00	-9.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah			20.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	25.556.000,00	25.000.000,00	46.600.000,00	21.044.000,00			-	-			61.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	12 Laporan	1.056.000,00	500.000,00	500.000,00	-556.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	87.010.000,00	94.890.000,00	94.890.000,00	7.880.000,00			-	-			364.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan				5 Unit	5 Unit	80.210.000,00	88.600.000,00	88.600.000,00	8.390.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAK OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-		6.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	9 Unit	6.800.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00	-510.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		8.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang di Berdayakan				95 %	95 %	478.919.600,00	0,00	0,00	421.080.400,00						900.000.000,00		
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial				95 %	95 %	478.919.600,00	0,00	0,00	-478.919.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	900.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	0 Orang	259.372.000,00	0,00	0,00	-259.372.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				13 Orang	0 Orang	89.547.600,00	0,00	0,00	-89.547.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.06.02.2.03.0003		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					50 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ekonomi Masyarakat			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0004		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					2 Lembaga	0 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ekonomi Masyarakat			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0005		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					30 Sertifikat	0 Sertifikat	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ekonomi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial				100 %	100 %	1.754.912.300,00	2.799.921.998,00	2.824.353.622,00	3.960.087.700,00							5.715.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL					DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.06.04.2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				100 %	100 %		735.580.000,00	730.942.432,00	710.394.432,00	-25.185.568,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Parwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Periwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		2.965.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0001		Penyediaan Permakaman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakaman Sesuai dengan Standar Dasi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	10 Orang		83.000.000,00	15.250.000,00	12.662.000,00	-70.338.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Parwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Periwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0002		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakisan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	8 Orang		28.480.000,00	13.000.000,00	10.570.000,00	-17.910.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Parwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Periwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat		250.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0003		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Perasa Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	44 Orang		13.090.000,00	53.000.000,00	50.201.000,00	37.111.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Parwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Periwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat		50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0004		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	0 Orang		27.826.000,00	0,00	0,00	-27.826.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0005		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Orang	12 Orang		16.000.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGLISHANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Parwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Periwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat		300.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0006		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang		0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGLISHANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Parwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Periwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat		200.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0008		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				465 Orang	595 Orang	537.750.000,00	553.692.432,00	553.692.432,00	15.942.432,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1.100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0012		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	75 Orang	29.434.000,00	25.000.000,00	12.269.000,00	-17.165.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial				100 %	100 %	1.019.332.300,00	2.068.979.566,00	2.113.959.190,00	1.094.626.890,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial	2.750.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.02.0007		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	39 Orang	359.959.900,00	471.104.288,00	471.104.288,00	77.144.388,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat		950.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.02.0008		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	192 Orang	590.368.400,00	1.247.875.278,00	1.292.854.902,00	699.486.502,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat		900.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.02.0010		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	10 Orang	32.004.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	317.996.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat		900.000.000,00	DINAS SOSIAL	
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial				85 %	85 %	407.028.600,00	0,00	0,00	373.548.200,00						780.576.800,00		
1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				95 %	95 %	407.028.600,00	0,00	0,00	-407.028.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS)	780.576.800,00	DINAS SOSIAL	
1.06.05.2.02.0001		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL				DAERAH	
1			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				257.716 Orang	0 Orang	76.452.000,00	0,00	0,00	-76.452.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0002		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				24418 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0003		fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota				22950 Keluarga	0 Keluarga	330.576.600,00	0,00	0,00	-330.576.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat			330.576.600,00	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0004		fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota				100 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persepsi Korban Bencana yang Tertangani				100 %	100 %	496.576.400,00	294.442.401,00	274.845.921,00	71.740.600,00							867.311.000,00	
1.06.06.2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persepsi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				100 %	100 %	496.576.400,00	294.442.401,00	274.845.921,00	-220.724.479,00					Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Korban Bencana	502.311.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0001		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakisan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pangulangan) Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	157 Orang	229.768.500,00	198.013.701,00	182.887.221,00	-46.881.279,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0002		Penyediaan Sandang																		
1.06.06.2.01.0004		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemangangan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				151 Orang	41 Orang	188.148.700,00	89.678.700,00	78.458.700,00	-109.690.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			217.311.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0005		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Orang	4 Orang	16.420.000,00	6.750.000,00	13.500.000,00	-2.920.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	0 Orang	61.233.200,00	0,00	0,00	-61.233.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02.0001		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	0 Kampung	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02.0002		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruha Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik				95 %	95 %	33.368.000,00	33.367.900,00	28.981.100,00	-8.386.000,00						25.000.000,00		
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				95 %	95 %	33.368.000,00	33.367.900,00	28.981.100,00	-4.386.900,00		-	-		Peringatan Hari Pahlawan	25.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	33.368.000,00	33.367.900,00	28.981.100,00	-4.386.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL	
J U M L A H									7.078.401.437,00	7.195.335.832,00	7.187.983.934,00	109.582.497,00						12.099.950.800,00		

Tabel 3.3

Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Bidang Urusan	RENJA 2025				PERUBAHAN RENJA 2025				Ket
		Jumlah			Total Pagu (Rp)	Jumlah			Total Pagu (Rp)	
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4	11	27	7,078,401,437	4	11	28	7.187.983.934	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Sosial ini disusun mengacu pada Perubahan RKPD tahun 2025 dan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029.

Perubahan Renja Dinas Sosial memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Berhasil tidaknya pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Sosial sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial. Untuk itu diperlukan sikap, mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Sosial, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Sosial juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Sosial dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata Kelola sumber daya manusia, tata Kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal perubahan anggaran berjalan, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA

S A F N I

BAB IV P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2025-2029.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Berhasil tidaknya pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Sosial, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Sosial dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal perubahan anggaran berjalan, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA

